

ETIKA TELEOLOGI DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTEK ADMINISTRASI PUBLIK

Karen Alfa Pontoan¹, Ambrosius Markus Loho²

^{1,2}Universitas Katolik De La Salle Manado, Jl. Kairagi I, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Email: kpontoan@unikadelasalle.ac.id

Article History

Received: 04-12-2025

Revision: 17-12-2025

Accepted: 19-12-2025

Published: 22-12-2025

Abstract. Every government needs a solid foundation. According to the author, this foundation is a crucial element, as it serves as a determinant in every policy taken by stakeholders. Success in carrying out public administration duties will be realized if it is based on a strong foundation, namely ethics. This article aims to explain and provide an analysis that ethics in public administration plays a major role in every public policy taken by decision-makers. The analytical descriptive method will be the model approach in this research. The results of the data analysis indicate that ethical values in public administration refer to basic moral principles such as integrity, honesty, transparency, accountability, fairness, and professionalism, which aim to create good governance by prioritizing the public interest, equality, and social justice.

Keywords: Ethics, Teleology, Public Administration, Good Governance, Society

Abstrak. Setiap pemerintahan perlu mempunyai dasar yang kokoh. Menurut penulis, dasar tersebut merupakan unsur penting, karena berfungsi sebagai penentu dalam setiap kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas administrasi publik akan terwujud jika didasari oleh fondasi yang kuat, yaitu etika. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan analisis bahwa etika dalam administrasi publik berperan sebagai faktor utama dalam setiap kebijakan publik yang diambil oleh para pengambil keputusan. Metode deskriptif analitis akan menjadi model pendekatan dalam penelitian ini. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam administrasi publik merujuk pada prinsip moral dasar seperti integritas, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kepentingan publik, kesetaraan, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Etika, Teleologi, Administrasi Publik, *Good Governance*, Masyarakat

How to Cite: Pontoan, K. A., & Loho, A. M. (2025). Etika Teleologi dan Implikasinya dalam Praktek Administrasi Publik. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (8), 12240-12250. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i8.4749>

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan filsafat dan etika mengajarkan bahwa dalam melihat sesuatu dengan pendekatan tertentu, kita harus menetapkan posisi epistemis kita secara jelas agar dapat memahami akar dan dasar dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks disertasi ini, perhatian utama tertuju pada etika teleologi. Untuk memahami dengan jelas dan tepat mengenai hal tersebut, sangat penting untuk mengidentifikasi akar dan dasar dari etika yang

telah dikenal secara luas di semua disiplin ilmu (Sudiantara, 2020). Dari sudut pandang etimologi, etika berasal dari istilah Yunani "ethos," yang secara harfiah berarti kebiasaan atau perilaku serta tindakan manusia. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada ilmu dan prinsip-prinsip dasar yang menilai perilaku serta tindakan manusia sebagai baik atau buruk. Objek material atau dapat disebut sebagai objek utama dari etika adalah perilaku manusia. Di sisi lain, objek formalnya berhubungan dengan penilaian mengenai baik dan buruk, serta benar dan salah dari perilaku atau tindakan manusia tersebut, sesuai dengan norma yang berlaku.

Begitu pula, etika dimaknai sebagai salah satu bagian dari filsafat yang memberikan evaluasi kritis terhadap setiap tindakan dan perilaku individu. Dalam konteks ini, etika memberikan evaluasi yang kritis terhadap perilaku, tindakan, dan segala perbuatan manusia. Dengan demikian, etika dapat disimpulkan sebagai ilmu yang terutama memusatkan perhatian pada tindakan individu dalam lingkungan sosial di dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, etika merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku individu yang berfikir. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa etika berperan sebagai 'penunjuk' untuk setiap tindakan individu atau manusia. Etika juga dapat diartikan sebagai penilaian yang cermat terhadap berbagai tindakan atau perilaku moral yang terdapat dalam masyarakat di mana setiap individu berada. Dalam bidang ilmu pengetahuan, etika dipandang sebagai disiplin yang mencari pedoman. Jika etika dipahami dengan cara ini, maka hal tersebut menunjukkan bahwa etika dimanfaatkan oleh manusia untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara menjalani hidup serta berperilaku atau bertindak (Loho, 2020).

Berdasarkan poin-poin utama dan dasar-dasar etika tersebut, dalam kajian ini, yaitu praktik administrasi publik, seorang pemimpin atau individu yang menjabat posisi tertentu dalam pemerintahan, terutama dalam sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat, harus benar-benar menguasai pokok-pokok etika sebagai dasar untuk bertindak. Penelitian Widiaswari (2022) menemukan bahwa etika yang merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi dan pelaku administrasi publik (Widiaswari, 2022). Putri (2024) menguraikan bahwa pelanggaran etika oleh pejabat publik memberi dampak signifikan bagi kepercayaan publik. Tindakan ini tidaklah etis. Maka dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk integritas pemerintah diragukan. Atas dasar itu, penerapan etika dalam administrasi publik menjadi suatu kewajiban bagi setiap penyelenggara publik (Putri, 2024). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa etika sangat berkaitan dengan semua aspek tindakan, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk individu yang menduduki posisi di pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, etika sangat diperlukan dalam administrasi publik.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah metode analisis deskriptif. Penulis awalnya menekankan penjelasan secara rinci tentang etika dan etika dalam administrasi publik, serta pentingnya hal tersebut bagi setiap tindakan manusia atau individu. Dalam uraian penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan secara umum terkait dengan etika dan penerapan etika dalam administrasi publik. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis yang mencakup reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori etika administrasi publik. Adapun semua data penulis ambil dari berbagai sumber untuk kemudian dirangkum dengan menggunakan pemaparan secara hermeneutis, atau penafsiran. Dari sini penulis kemudian membuat analisis dan sebuah kesimpulan akhir.

HASIL

Etika dan Etika Administrasi Publik

Integritas dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan secara jujur serta tidak menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang dimiliki. Selama itu, akuntabilitas merujuk pada fakta bahwa setiap keputusan perlu dapat dijelaskan di depan masyarakat. Transparansi mengacu pada kondisi di mana terdapat kejelasan dan keterbukaan dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, keadilan menekankan perlakuan yang setara bagi seluruh warga tanpa adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan. Selain itu, tanggung jawab mencakup pelaksanaan tugas sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar profesional yang berlaku. Akhirnya, orientasi dalam pelayanan publik menekankan pada pengutamaan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Simarmata, 2025).

Dalam situasi ini, sangat penting untuk menjelaskan tentang etika yang berkaitan dengan administrasi publik. Etika dalam administrasi publik sangat penting karena merupakan landasan moral dalam pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Tanpa etika, administrasi publik berisiko tidak mencapai tujuannya, yaitu memenuhi kepentingan masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa alasan utama:

- Mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Etika memberikan bantuan kepada pegawai publik dalam mengidentifikasi perbedaan antara perilaku yang benar dan salah, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi.
- Meningkatkan rasa percaya publik. Pemerintah yang bersikap jujur, transparan, dan adil akan menciptakan kepercayaan di masyarakat. Keyakinan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keberhasilan suatu kebijakan.

- Memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Etika menuntun pejabat untuk bertindak secara profesional, responsif, dan tanpa membedakan, sehingga pelayanan publik dapat meningkat.
- Sebagai dasar untuk akuntabilitas dan tanggung jawab. Setiap pilihan dan langkah yang diambil oleh pegawai publik wajib dapat dipertanggungjawabkan. Etika memberikan pedoman yang jelas mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan.
- Menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Etika menetapkan batasan dalam penggunaan kekuasaan agar tidak merugikan masyarakat dan tetap sesuai dengan tujuan pemerintahan, serta mendorong integritas dan profesionalisme. Pegawai negeri yang menghormati etika akan memegang teguh nilai-nilai kejujuran, integritas, dan komitmen kepada kepentingan masyarakat.

Etika memainkan peran yang sangat penting dalam administrasi publik dengan tujuan: Pertama, untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, untuk membangun keyakinan masyarakat kepada pemerintah. Ketiga, guna menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Keempat, agar dapat menjamin bahwa kebijakan serta tindakan pemerintah selalu sesuai dengan prinsip moral dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pada akhirnya, dari perspektif yang serupa, etika dalam administrasi publik adalah sekumpulan norma dan nilai yang memandu tindakan pegawai negeri agar sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Norma ini menekankan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, kejujuran, integritas, dan profesionalisme guna memastikan layanan publik yang adil, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan etika ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan serta mencegah penyalahgunaan wewenang (Kurniasih, 2024).

Etika Teleologi sebagai Landasan Etika Administrasi Publik

Setiap tindakan yang menunjukkan kejujuran, kebijaksanaan, kesetiaan terhadap komitmen, ketulusan, dan rasa hormat kepada yang lebih tua dianggap sebagai tindakan yang baik karena hasil dari perilaku tersebut adalah positif. Bukan disebabkan oleh karakteristik bawaan dari tindakan itu. Sebaliknya, perilaku berbohong, angkuh, melanggar hak orang lain, dan menipu publik dianggap negatif karena konsekuensi dari tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian (Nadeak, 2020). Demikian juga, seseorang yang jujur adalah orang yang siap untuk menghadapi serta menanggung konsekuensi dari situasi yang terjadi, baik yang muncul akibat keputusan maupun aksi yang diambil, termasuk yang membawa

manfaat maupun yang telah dipahami serta yang belum dipahami yang dapat menyebabkan kerugian.

Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu perilaku atau tindakan, apakah termasuk dalam kategori moral atau tidak, dilakukan dengan mengacu pada akibat yang ditimbulkan. Jadi, apabila suatu tindakan menghasilkan efek yang baik, tindakan tersebut dinilai sebagai moral, sedangkan jika menghasilkan efek yang buruk, tindakan itu dinilai tidak moral. Maka, teori ini menyoroti betapa pentingnya hasil dari suatu tindakan manusia atau subjek. Dengan kata lain, sebelum mengambil suatu langkah, seseorang harus mempertimbangkan terlebih dahulu konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Kita seharusnya terus melakukan tindakan yang memberikan efek positif, sambil menghindari tindakan yang dapat memberikan efek negatif.

Dalam penerapannya, teori ini mendorong individu untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Setiap tindakan memiliki akibat masing-masing. Tanpa pertimbangan yang cermat, seseorang dapat terperangkap dalam keadaan yang tidak diharapkan (Maiwan, 2018). Sejalan dengan pandangan itu, dalam pembahasan tentang etika teleologi yang disusun oleh penulis, referensi yang digunakan adalah pandangan etika dari Jeremy Bentham. Tidak seperti pendekatan deontologi, etika teleologis mengevaluasi tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau hasil yang dihasilkan dari tindakan itu.

Dengan cara yang sama, suatu tindakan dianggap baik jika tujuan yang ingin dicapai adalah positif atau jika hasil yang diperoleh memberikan manfaat. Sebagai contoh, tindakan mencuri dalam kerangka etika teleologi dapat diklasifikasikan sebagai baik atau buruk berdasarkan hasil atau tujuan yang ingin diraih. Apabila tujuan dianggap baik, maka tindakan mencuri dapat dipandang positif, dan sebaliknya. Misalnya, seorang anak yang mencuri demi membantu ibunya atau ayahnya yang sedang sakit parah akan dinilai secara moral secara positif, meskipun secara hukum, tindakan tersebut tidak sah dan dapat dikenakan sanksi.

Oleh karena itu, etika teleologi memiliki karakter yang lebih kontekstual, karena tujuan atau hasil dari suatu tindakan dapat sangat tergantung pada situasi tertentu. Pernyataan ini menjelaskan alasan mengapa setiap norma dan tanggung jawab moral tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dalam setiap situasi, yang berbeda dengan pandangan Kant. Tantangan yang dihadapi dalam etika teleologi adalah cara untuk menilai apakah sebuah tujuan atau hasil dapat dianggap sebagai sesuatu yang baik. Bermanfaat untuk siapa, apakah itu bermanfaat bagi individu, bermanfaat bagi para pengambil keputusan, atau bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan (Benlahcene, 2028).

Etika teleologi menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini memberikan dampak penting bagi masyarakat. Ini karena sikap teleologi dari Jeremy Bentham fokus pada mencapai hasil yang paling menguntungkan untuk sebanyak mungkin orang. Para pejabat publik perlu memikirkan: Pertama, manfaat terbesar bagi masyarakat, Kedua, efisiensi penggunaan sumber daya publik, Ketiga, dampak kebijakan dalam jangka panjang. Etika teleologi atau utilitarianisme adalah teori moral yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan akibatnya. Kebijakan dianggap benar jika dapat memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Di samping itu, tujuan dari administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan teleologis menjadi penting karena tidak hanya mengevaluasi apakah kebijakan memberikan manfaat maksimum bagi publik, tetapi juga mencari cara untuk mengurangi kerugian sosial, serta mempertanyakan apakah keputusan pemerintah mencerminkan efisiensi dan keadilan dalam pembagian. Lebih dari itu, etika pelayanan publik adalah tentang melaksanakan apa yang benar-benar diperlukan sesuai dengan nilai moral dan kebutuhan dalam pelayanan serta administrasi publik.

Etika administrasi yang mencakup pelayanan publik itu juga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah dilakukan dengan integritas, jujur, dan adil. Ini mencakup aspek-aspek seperti responsive terhadap keinginan masyarakat, keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya publik, dan akuntabilitas terhadap hasil yang diperoleh. Hal ini pun sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak diperlakukan dengan adil dan menerima pelayanan berkualitas dari pemerintah. Oleh karena itu, etika dalam pemanfaatan sumber daya publik adalah norma moral yang mengatur bagaimana pemerintah serta lembaga publik menggunakan dan mengelola sumber daya yang ada demi kepentingan masyarakat secara adil dan efisien. Pemanfaatan sumber daya publik yang beretika mencakup keadilan dalam distribusi sumber daya, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat. Selain itu, etika dalam pemanfaatan sumber daya publik juga mencakup aspek seperti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan sumber daya, serta tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya tersebut (Ishaka, 2024).

Dalam bidang administrasi publik, teleologi diterapkan dengan cara berikut seperti: analisis dampak yang fokus pada hasil. Dalam konteks poin pertama ini, pejabat publik menilai berbagai pilihan kebijakan berdasarkan manfaat ekonomi, dampak sosial, kemungkinan kerugian bagi kelompok tertentu, serta hasil positif baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Selanjutnya, efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan sumber daya publik harus memberikan manfaat maksimum dengan biaya serendah mungkin melalui analisis biaya dan manfaat. Demikian juga, dalam hal konteks etika berkeadilan, meskipun menekankan keuntungan bagi mayoritas, teleologi zaman sekarang tetap memperhatikan hal-hal berikut yakni: Kelompok yang rentan, pembagian dampak, keseimbangan antara keuntungan untuk individu dan kepentingan masyarakat luas (Holilah, 2013). Dalam praktek dan aktivitas sehari-hari, kita bisa melihat contoh lain seperti dalam hal pelaksanaan kebijakan anggaran yang tampak misalnya ketika pemerintah menyalurkan anggaran untuk bidang-bidang yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Praktek ini haruslah mengabdikan kepada keuntungan besar masyarakat, karena itu akan dianggap etis dan sesuai dengan tujuan dari etika teleologis sebagaimana yang dimaksud.

Hal yang berkaitan dengan hal tersebut juga menunjuk kepada bagaimana kebijakan penutupan usaha yang berisiko tinggi. Dengan menutup usaha yang bisa berbahaya (seperti industri yang merusak lingkungan) meskipun merugikan pemilik adalah tindakan konkret yang juga melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi yang sama, hal penting lainnya adalah kebijakan yang mengutamakan layanan publik. Dalam situasi darurat (seperti banjir atau kecelakaan besar), petugas atau pegawai publik harus memberikan prioritas pada penyelamatan kelompok yang memiliki kemungkinan selamat yang lebih tinggi atau jumlah korban yang lebih banyak. Ini termasuk juga digitalisasi layanan publik. Pemerintah menerapkan layanan online (seperti OSS dan Dukcapil Online) untuk: mempercepat proses layanan, mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan akses bagi masyarakat.

Keuntungan terbesar bagi masyarakat membuatnya etis dari sudut pandang teleologis, seperti yang terlihat dalam penerapan pajak konsumsi untuk mengurangi risiko sosial. Peningkatan pajak pada rokok, minuman keras, atau plastik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan kesehatan. Oleh karena itu, manfaat dan keunggulan penerapan etika teleologis dalam administrasi publik adalah: Memotivasi pemerintah untuk lebih fokus pada hasil dan dampak, mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan yang baik, mampu menyelesaikan dilema etika yang memerlukan analisis manfaat dan kerugian, dan mengutamakan kepentingan publik secara luas.

Analisis Teleologis atas Praktek Etika Administrasi Publik

Etika teleologis adalah suatu metode etika yang menilai baik atau buruknya sebuah tindakan berdasarkan tujuan dan hasil yang ditimbulkan. Dalam teleologi, tindakan dikategorikan etis jika: memberikan manfaat maksimal, mengurangi kerugian, dan membantu

mencapai tujuan moral yang dianggap berharga bagi masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, pendekatan ini sangat penting karena kegiatan birokrasi selalu dilakukan untuk kepentingan masyarakat, pencapaian kinerja, dan hasil yang dirasakan oleh publik. Untuk lebih mengerti tentang etika teleologis yang berkaitan dengan praktik administrasi publik, penting untuk menjelaskan beberapa ciri yang ada dalam teleologi di bidang ini. Pertama, penekanan pada hasil. Teleologi menyatakan bahwa etika tak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga seberapa besar kebijakan atau tindakan birokrasi memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Pentingnya efektivitas dan efisiensi sebagai aspek moral. Teleologi melihat efektivitas dan efisiensi bukan hanya sebagai nilai manajerial, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan sebaik-baiknya. Ketiga, manfaat publik sebagai ukuran moralitas. Tindakan seorang administrator dianggap etis jika meningkatkan: kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak warga, serta akses terhadap layanan dan pemerataan manfaat. Dengan demikian, teleologi sangat penting dalam penerapan etika dalam administrasi publik. Hal ini berakar pada fakta bahwa etika teleologi dapat memperkuat dasar tindakan setiap pembuat kebijakan publik. Selain itu, teleologi dalam proses pengambilan keputusan di birokrasi sangat jelas terlihat dalam praktik administrasi publik, di mana keputusan sering kali terjebak dalam perdebatan antara prosedur dan hasil yang diperoleh.

Oleh karena itu, pendekatan teleologis menjelaskan juga bahwa: Pertama, sebuah pilihan dianggap baik secara etis jika hasilnya memperbaiki kehidupan masyarakat, meskipun kadangkala hal itu memerlukan sedikit fleksibilitas dalam menjalankan prosedur. Misalnya, mempercepat layanan darurat saat bencana yang melewati beberapa langkah administrasi bisa dibenarkan dari perspektif teleologis karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa orang. Dengan demikian, dari penjelasan ini, nilai moral suatu tindakan bergantung pada konsekuensi yang lebih besar bagi keselamatan dan kesejahteraan publik (Mitchel, 2024).

Di sisi yang sama, teleologi juga berhubungan dengan manajemen layanan publik. Teleologi menilai kualitas layanan publik berdasarkan pengaruhnya terhadap pengguna. Layanan yang cepat, mudah, ramah, dan terjangkau dianggap etis karena memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat. Sebaliknya, layanan yang lambat dan rumit tidak hanya tidak efisien, tetapi juga dianggap tidak etis dalam pandangan teleologis karena menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Oleh karena itu, pelayanan publik yang berfokus pada hasil mencerminkan prinsip teleologis dalam administrasi. Teleologi dalam pengelolaan anggaran publik juga menilai bagaimana dana dialokasikan dan digunakan. Praktek harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, serta mengurangi pemborosan,

penyimpangan, atau penggunaan yang tidak efisien. Contoh nyata dari hal ini adalah pemindahan sebagian dana untuk keperluan protokoler pegawai pemerintah demi meningkatkan layanan kesehatan masyarakat karena dampak positif bagi publik lebih terasa.

Sementara dalam usaha untuk mencegah korupsi, pendekatan teleologis menguatkan pendapat bahwa korupsi: Mengganggu kesejahteraan bersama, mengurangi hasil dari kebijakan publik, dan menghalangi pembangunan. Dengan adanya hal ini, menurut pandangan teleologis, korupsi dianggap sangat tidak etis, karena menyebabkan dampak negatif yang besar dan luas. Sebagai bagian dari penilaian tentang penerapan etika teleologi dalam administrasi publik, penting untuk diingat bahwa ada tantangan yang cukup rumit. Tantangan dalam menerapkan teleologi dalam administrasi publik meliputi: (1) Risiko mengabaikan prosedur hukum. Teleologi dapat mendorong tindakan yang "cepat" untuk mencapai hasil tertentu. Ini bisa menimbulkan masalah hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. (2) Penilaian manfaat yang bersifat subjektif. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang apa yang dianggap sebagai "manfaat terbesar." (3) Kemungkinan munculnya konflik kepentingan. Para pengelola mungkin menggunakan alasan "manfaat publik" untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Etika teleologi memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip etika lain. Dalam praktik administrasi publik, analisis teleologi sebaiknya digabungkan dengan etika: etika Deontologi yang tampak dalam ketaatan pada peraturan dan kewajiban, yang berkaitan dengan etika kebajikan dalam membentuk karakter moral para pejabat publik, serta etika keadilan yang terlihat dalam usaha untuk memastikan pembagian manfaat yang adil. Etika teleologi memberikan panduan untuk tujuan akhir, sedangkan pendekatan lainnya mengatur cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, analisis teleologis terhadap praktik etika dalam administrasi publik menekankan bahwa: Tindakan yang dianggap etis adalah yang memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan bersama. Dengan demikian, etika tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga hasil moral yang diperoleh. Teleologi memberikan kerangka untuk menilai kualitas layanan, kebijakan, pengelolaan anggaran, dan integritas birokrasi dari segi dampaknya bagi masyarakat. Namun, penerapan teleologi harus dilakukan dengan keseimbangan terhadap hukum dan prinsip etika lainnya.

KESIMPULAN

Etika teleologi mengutamakan bahwa hasil dan tujuan akhir dari suatu tindakan menjadi dasar untuk menilai moralitasnya. Dalam konteks administrasi publik, pendekatan ini menunjukkan bahwa tindakan birokrasi dianggap baik jika memberikan manfaat terbesar,

mengurangi kerugian, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penggunaan etika teleologis dalam administrasi publik berfokus pada hasil, efektivitas, efisiensi, dan distribusi manfaat yang adil dalam layanan publik. Keputusan birokrasi dianggap bermoral jika menghasilkan dampak positif yang nyata, seperti peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan anggaran yang lebih baik, dan perlindungan hak serta kebutuhan masyarakat.

Namun, pendekatan ini juga menghadapi beberapa kendala, seperti risiko mengabaikan prosedur hukum, subjektivitas dalam menilai manfaat, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, teleologi perlu diseimbangkan dengan prinsip-prinsip etika lainnya, seperti deontologi (kepatuhan pada hukum), etika kebajikan (karakter moral), dan keadilan (distribusi manfaat secara adil). Secara keseluruhan, etika teleologi berperan sebagai dasar yang penting untuk memastikan bahwa administrasi publik tidak hanya mengikuti aturan yang ada, tetapi juga mencapai tujuan moral yang lebih tinggi, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara optimal, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Behaviorism*. (2023, Maret). Retrieved from psychologywriting.com: <https://psychologywriting.com/deontology-and-patients-autonomy/>
- Abderrahmane Benlalcene, e. a. (2018). A Narrative Review of Ethics Theories: Teleological & Deontological Ethics. *OSR Journal of Humanities and Social Science*, 31.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Connie M. Ulrich, e. a. (2010, Aug 23). *National Library of Medicine*: Retrieved from www.ncbi.nlm.nih.gov: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865804/>
- Fiala, B. M. (2016: 116). *Ethics: Theory and Contemporary Issues, Ninth Edition*. Boston: Cengage Learning.
- Holilah. (2013). Etika Administrasi Publik. *Jurnal Review Politik*, 233. <https://www.britannica.com/topic/teleological-ethics>. (n.d.). Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/teleological-ethics>: <https://www.britannica.com/topic/teleological-ethics>
- Ilkafah. (2021). *Pentingnya Menerapkan Prinsip Etik pada Tindakan Keperawatan*. Retrieved Maret Minggu, 2023, from <https://news.unair.ac.id/2021/05/20/pentingnya-menerapkan-prinsip-etik-pada-tindakan-keperawatan/?lang=id>
- Ivypanda. (2022, April). *essay*. Retrieved from ivypanda.com: <https://ivypanda.com/essays/kants-ethical-theory-of-deontology-in-nursing/>
- Jhon Kenedy Simarmata, d. (2025). Peran Iklim Integritas dalam Menjelaskan Pengaruh Kepemimpinan Etis terhadap Pelanggaran Integritas di Sektor Publik. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 246.
- Kurniasih, P. G. (2024). Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3474.
- Loho, A. M. (2020, Mei Kamis). *Kolom & Interaktif*. Retrieved from Jejakpublik.com: <https://jejakpublik.com/apakah-etika-kita-sudah-mulai-runtuh/>
- Maiwan, M. (2018). Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol 17 No 2*, 193.

- Manado, F. K. (2023, Maret Rabu). *Unikadelasalle.ac.id*. Retrieved from Visi Misi Fakultas Keperawatan: <https://unikadelasalle.ac.id/visi-dan-misi-ilmu-keperawatan/>
- Mukhlis Ishaka, d. (2024). *Etika Administrasi Publik*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Nadeak, L. (2020). Sikap Jujur Mendasari Tanggung Jawab. *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, 36.
- Polly Mitchel, e. a. (2024). Making Ends Meet: A Conceptual and Ethical Analysis of Efficiency. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 1.
- Putri, S. L. (2024). Etika Administrasi Publik dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2.
- Rapih, S. P. (2023, Maret Rabu). *Profil Perawat*. Retrieved from [Stikespantirapih.ac.id: http://stikespantirapih.ac.id/?page_id=258](http://stikespantirapih.ac.id/?page_id=258)
- Staffnew.uny. (2023, 3 3). *Staffnew*. Retrieved from [uny.ac.id: http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/TEORI+ETIKA.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/TEORI+ETIKA.pdf)
- Sudiantara, Y. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Semarang: Universitas Soegijapranata.
- Utkualp, N. (2015). Ethical Issues and Dilemmas Encountered in Nursing Practice in Turkey. *International Journal of Caring Sciences*, 830.
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 600.